



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Polres Segera Hitung KN

BENTENG - Polres Bengkulu Tengah saat ini terus mengumpulkan bukti dan data terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Polres Benteng akan segera menghitung Kerugian Negara (KN) dari kasus dugaan korupsi ini.

Kapolres Benteng, AKBP. Ary Baroto, S.IK, MH melalui Kasat Reskrim Polres Benteng, Iptu. Donald Sianturi, SH, MH menjelaskan, pada saat ini kasus dugaan korupsi retribusi TKA ini masih proses penyelidikan. Pihaknya sedang mempersiapkan seluruh data untuk melakukan penghitungan KN tersebut.

"Pada saat ini penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi PAD retribusi TKA di Benteng pada saat ini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi untuk mengumpulkan data. Hingga saat ini untuk total saksi yang sudah sudah mencapai belasan saksi. Baik itu melakukan pemeriksaan terhadap pihak perusahaan dan Disnakertrans Provinsi Bengkulu," jelasnya.

Untuk pemanggilan terhadap perusahaan, Satreskrim Polres Benteng diketahui sudah melakukan pemanggilan terhadap terhadap manajemen PT. Kusuma Raya Utama (KRU) dan PT. Inti Bara Perdana (IBP). Setelah melontarkan pertanyaan tersebut, kedua perusahaan ternyata memang sudah mentransfer retribusi TKA sejak tahun 2016 lalu ke rekening Disnakertrans.

"Kemudian tim juga sudah melakukan pemanggilan terhadap beberapa ASN yang bertugas di Disnakertrans Provinsi untuk mempertanyakan perihal aturan-aturan yang menyangkut TKA tersebut. Kemudian sudah meminta keterangan dari saksi ahli yang terdiri dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," ujarnya.

Selanjutnya, kemudian para mantan pejabat di Disnakertrans Benteng, baik itu mantan Kadis hingga mantan Kabid. Untuk diketahui kasus ini masih panjang karena kita masih akan mengumpulkan bukti dan data, namun kasus ini terus diselidiki. Untuk diketahui dalam dugaan tindak pidana korupsi retribusi TKA, pihaknya melakukan penyelidikan untuk retribusi TKA dari tahun 2016 hingga tahun 2019.

"Sebab kita mempertanyakan uang retribusi TKA dari tahun 2016 hingga tahun 2019 kemana uang tersebut. Karena pada tahun 2019 lalu, Peraturan Bupati (Perbup) tentang Retribusi TKA tersebut harus ditransfer ke rekening Kas Daerah (Kasda) Benteng baru terbit. Maka retribusi TKA dari tahun 2016 hingga tahun 2019 yang kita pertanyakan kemana uang tersebut. Sedangkan perusahaan dari tahun 2016 hingga 2019 sudah menyetorkan uang tersebut. Ini yang sedang kita selidiki dan terus mencari data dalam pengusutan kasus dugaan korupsi ini,"